

## **SEJARAH PESANTREN DI KUNINGAN (JAWA BARAT) PADA MASA ORDE BARU 1966-1998**

**Arif Hidayat, Ahmad Kosasih**

Pendidikan Sejarah, Universitas Indraprasta PGRI

Email: ariefhidayat1610@gmail.com, aseng.kosasih@gmail.com

### **Abstrak**

Jaringan birokrasi yang menjadi dasar bagi kepentingan politik pemerintahan Orde Baru, sejatinya diterapkan pula untuk dapat menghegemoni pelebagaan pesantren di Indonesia. Mesin birokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru, juga menjadi alat untuk dapat masuk kedalam lembaga pesantren dan mendapatkan dukungan dari pelebagaan pesantren. Karir politik yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru bagi setiap elite lokal atau desa yang bersedia mendukung pemerintahan Orde Baru melalui Golongan Karya, menjadi semacam tantangan (godaan) bagi setiap elite lokal khususnya pemimpin pondok pesantren. Tidak hanya peluang karir dalam bidang politik, pemerintahan Orde Baru juga memberikan banyak bantuan (pendanaan) dan kemudahan (administrasi), bagi para elite lokal religi (Kyai) yang mengasuh pondok pesantren dengan kompensasi mendukung pemerintahan Orde Baru.

**Kata kunci:** Pesantren, Kuningan, dan Orde Baru

### **PENDAHULUAN**

Golongan pesantren yang terdiri dari para kyai dan santri menjadi salah satu elemen penting pada peristiwa 10 November 1945. Besarnya pengaruh pesantren melalui para kyai dan santri merupakan satu fenomena yang cukup menarik dalam sejarah perkembangan Republik Indonesia masa kolonial hingga masa kemerdekaan. (Muhakamurrohman, 2014; Burhanudin, 2012; Herman, 2013) Oleh sebab itu, tidaklah membingungkan jika kemudian berdiri cukup banyak partai-partai bernafaskan ke-Islaman pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, peran pesantren dalam dinamika masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa tidak terlalu besar, hal ini ditandai dengan belum cukup banyak diberikannya perhatian pemerintah terhadap lembaga pesantren dalam bentuk

perundang-undangan yang mengatur dan memberikan posisi seimbang antara pendidikan formal (sekolah umum) dengan lembaga pendidikan pesantren. Persepsi mengenai pendidikan yang dijalankan di pesantren pada umumnya belum banyak memberikan pengetahuan umum, yang menyebabkan pemerintah perlu mengatur dan manata pengelolaan kependidikan di pesantren. Meskipun lembaga pendidikan pesantren telah diatur melalui Peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1946, pemerintah hanya memberikan bantuan saja dalam proses belajar mengajar, sementara pengelolaan dan substansi pengajaran tetap diberikan sepenuhnya oleh pemilik pesantren, yakni para kyai. Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952, pesantren mulai mendapatkan perhatian, dalam bentuk penyeragaman jenjang pendidikan.

Kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka untuk memberikan suport dan dukungan kepada lembaga pendidikan pesantren, untuk dapat mengikuti perkembangan pendidikan modern secara lebih luas. Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan modern, selaras dengan arah dan perkembangan pendidikan global membuat pesantren harus dapat beradaptasi dengan tuntutan pendidikan nasional. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952, pemerintah mulai banyak memberikan injeksi muatan pendidikan modern terhadap substansi pengajaran yang diberikan di pesantren. Meskipun pada perjalanannya pengaruh pendidikan pesantren yang lebih dominan bernuansa religi masih tetap dominan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, hingga kejatuhannya, status lembaga pendidikan pesantren umumnya masih dikelola secara mandiri (swasta) oleh para kyai, belum dibawah naungan pemerintah (negeri)

Dinamika politik nasional yang cukup besar pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tidak banyak memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan pesantren untuk berbuat banyak dalam mendukung pendidikan nasional. Para pemimpin pesantren (kyai) hingga santri cukup banyak yang terkooptasi dengan dinamika politik, yang cenderung bersifat pragmatis. Konflik antara Partai Komunis Indonesia di dalam parlemen, hingga pemberatasan kekuatan-kekuatan sosial-politik Partai Komunis Indonesia juga melibatkan unsur-unsur yang berasal dari lembaga pesantren baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno, yang digantikan oleh

pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi lembaga pendidikan pesantren. Pada tahun 1967, diterbitkan kebijakan Penetapan Menteri Agama No. 80 tahun 1967 yang mengatur pendirian lembaga pesantren (dengan jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah) yang dikelola dan dibawah naungan pemerintah. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, lembaga pendidikan pesantren mulai berstatus milik pemerintah. Melalui sumber yang didapatkan, tercatat sejak tahun 1967 hingga tahun 1970 lembaga pesantren yang dimiliki oleh pemerintah sudah mencapai angka 358 buah. Pada tahun berdasarkan pelaksanaan kebijakan Keputusan Menteri Agama no. 15,16 dan 17 tahun 1978, singkatan Madrasah Tsanawiyah Negeri dari M.Ts.A.I.N diubah menjadi MTsN dan jumlahnya menjadi 470 buah.

Pesantren-pesantren yang didirikan oleh pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, umumnya berada diwilayah pulau Jawa. Sekolah-sekolah pesantren yang didirikan oleh pemerintah umumnya memberikan porsi pendidikan/pengetahuan umum yang lebih besar dibandingkan pesantren-pesantren yang dikelola oleh Kyai secara independent (mandiri). Memasuki medio tahun 1970-an, pemerintahan Presiden Soeharto menjalankan kebijakan Repelita, yang diarahkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini pada dasarnya ialah mengatur segala bentuk dimensi kehidupan masyarakat, sesuai dengan yang telah digariskan oleh pemerintah. Dunia pendidikan nasional, termasuk lembaga pendidikan pesantren juga turut

pula menjalankan apa yang menjadi kebijakan negara.

Kebijakan pendidikan yang sentralistis dan penggunaan kekuatan birokrasi yang cukup ketat, membuat lembaga pendidikan pesantren dalam perjalanannya menghadapi fenomena kelemahan dalam hal inovasi. Meskipun fenomena (lemahnya inovasi) juga dirasakan oleh lembaga pendidikan formal lainnya, akan tetapi situasi yang cukup kompleks sangat dirasakan oleh lembaga pendidikan pesantren. Negara mulai memperketat kebijakan mengenai substansi materi-materi ajar yang disesuaikan oleh kepentingan negara (seperti pendidikan pancasila, kewarganegaraan, hingga pelaksanaan P4) bagi para peserta didik.

Perkembangan lembaga pendidikan pesantren pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, sejatinya sudah memasuki masa-masa modernisasi. Akan tetapi kelemahan manajemen pengelolaan, ketertinggalan pesantren dalam menciptakan sumber daya manusia yang adaptif dengan perkembangan teknologi tidak dapat diselesaikan dengan cepat, bahkan hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto.

Wilayah Kuningan adalah sebuah wilayah yang berada di ujung timur wilayah Jawa Barat, yang berdekatan dengan daerah terluar dari masyarakat Jawa Tengah. Wilayah Kuningan merupakan wilayah di Jawa Barat yang cukup banyak terdapat keberadaan pesantren. Sejak masa kolonial, beberapa pesantren sudah berdiri dan dikenal di wilayah Kuningan. Beberapa pesantren yang terdapat di wilayah Kuningan diantaranya adalah Pesantren Ciwedus yang didirikan oleh K. H. Kalamudin, ulama asal Banten, pada awal

abad ke-18. Pesantren tua yang juga terkenal di Kuningan adalah Pesantren Lengkong. Pesantren ini didirikan oleh Syekh Haji Muhammad Dako, utusan dari Cirebon, pada sekitar akhir abad ke-18.

Hingga pada kemerdekaan dan memasuki pemerintahan Orde Baru, keberadaan pesantren di wilayah Kuningan, berkembang menjadi pesat. Sebagai contoh ialah keberadaan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan tidak lepas dari peran Gubernur Jawa Barat Nuriana ketika masih menjabat. Pembentukan FKPP terkesan politis, itu bisa dilihat dari agenda-agenda dan kegiatan FKPP telah menjadi underbow dari partai politik yang berkuasa pada masa orde baru. Salah satu bukti FKPP menjadi underbow dari suatu partai adalah ketika dalam setiap kegiatannya para anggota FKPP yang merupakan ulama-ulama dan kiai-kiai dari berbagai pondok pesantren menggunakan jas / kostum berwarna kuning yang merupakan simbol dari partai politik yang berkuasa pada masa orde baru tersebut.

Pengkajian sejarah terhadap perkembangan kehidupan pesantren di wilayah Kuningan-Jawa Barat menjadi semakin menarik, manakala jika kita melihatnya melalui kaca mata ruang publik. Kehidupan masyarakat sejatinya tidaklah lepas dan bebas seperti ruang yang kosong, akan tetapi terjadi tarik menarik yang cukup kuat antara kelompok-kelompok yang berada di dalamnya. Wilayah Kuningan sebagai arena ruang publik, dapat kita katakan sebagai sebuah arena dimana didalamnya terdapat pertarungan antara kelompok-kelompok sosial termasuk negara upaya merepresentasikan pengaruh dan kekuatannya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Umat Islam Dalam Arah Kebijakan Politik Masa Orde Lama Hingga Transisi Masa Orde Baru**

Pada masa kebijakan Demokrasi Terpimpin yang di gagas oleh Presiden Soekarno, kelompok Islam menghadapi masa-masa adaptasi yang cukup sulit karena harus hidup di dalam satu atap politik dengan kelompok komunis. Partai politik NU merupakan kekuatan politik Islam yang sekiranya mampu beradaptasi dengan baik dalam iklim politik NASAKOM yang disuarakan oleh Presiden Soekarno. Garis politik NU yang cenderung merawat amanat proklamasi kemerdekaan dalam bentuk harmonisasi dan ke-bhinekaan., dinilai mampu untuk mengimbangi jalan politik Soekarno. NU dan Soekarno memang sudah memiliki jalinan relasional yang cukup panjang, sejak masa perang kemerdekaan, bahkan hingga memasuki akhir pemerintahan Presiden Soekarno. NU selalu hadir dalam pemerintahan Presiden Soekarno, hal tersebut bukan tanpa sebab, karena NU menjadi pemimpin dalam menghadapi kekuatan komunisme di Indonesia yang juga sudah menyebarkan pengaruhnya hingga akhir tahun 1960-an.

Situasi politik Indonesia sepanjang akhir tahun 1950-an hingga akhir tahun 1960-an tidak menguntungkan bagi kelompok Islam, karena menghadapi dua kekuatan politik yang cukup besar yakni kelompok Nasionalis dan Komunis. Dalam situasi yang demikian (dihimpit kekuatan politik Nasionalis dan Komunis), kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang tidak setuju dengan pemikiran pemerintahan pimpinan Presiden Soekarno melakukan perlawanan. Perlawanan yang cukup terkenal oleh kelompok-kelompok Islam

di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno adalah pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Pemberontakan yang di pimpin oleh S.M. Kartosoewirjo di daerah Jawa Barat tersebut, menyebar hingga ke wilayah Aceh dan Sulawesi Selatan.

Menjelang pertengahan tahun 1960-an, situasi politik nasional semakin meruncing yang diakibatkan oleh peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi TNI angkatan darat. Peristiwa yang terkenal dengan nama G30S tersebut, menjadi awal bagi jatuhnya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Partai Komunis Indonesia yang dituding sebagai dalang dalam peristiwa G30S tersebut, menghadapi arus balik yang cukup besar. Pembersihan yang dilakukan oleh kelompok militer dan kekuatan-kekuatan sipil (dalam hal ini kelompok Islam yang kontra dengan keberadaan Komunis di Indonesia), perlahan-lahan melakukan pembersihan (di level elite hingga akar rumput) terhadap unsur-unsur yang menjadi pendukung Partai Komunis Indonesia.

Pasca meletusnya peristiwa G30S dan arus balik menentang keberadaan Partai Komunis Indonesia beserta unsur-unsur yang mendukungnya, beberapa kelompok-kelompok Islam ikut berpartisipasi untuk melakukan penumpasan dan pembersihan tersebut. Kelompok-kelompok Islam membentuk badan-badan dan memobilisasi organisasi-organisasi massa pada periode penumpasan dan pembersihan unsur-unsur Partai Komunis Indonesia. Tercatat beberapa organisasi seperti : Kogalam (Komando Kesiapsiagaan Umat Islam), Gemuis (Generasi Muda Islam), Banser,

Kokam, Brigade PII, Kobar HMI dan lainnya bahu membahu membantu kekuatan militer dalam upaya menumpas sisa gerakan G30S.

Selama usaha untuk membersihkan sisa-sisa gerakan G30S situasi politik ditingkat elite nasional, menghadapi transisi pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno menuju pemerintahan Presiden Soeharto. Tepatnya pada 20 Februari 1967 setelah penolakan laporan pertanggung jawaban (pidato Nawaskara) oleh MPRS, Presiden Soekarno resmi turun dari kursi kepemimpinan nasional (Presiden Republik Indonesia). Kelompok Islam di Indonesia menghadapi situasi politik yang cukup berbeda dengan situasi politik, yang ada pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dibawah kendali Presiden Soeharto dimulailah sebuah masa yang kemudian dikenal dengan nama masa pemerintahan Orde Baru.

Kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam konteks politik Indonesia, yang menetralkan kehidupan politik nasional, juga berimbas kepada kelompok Islam di Indonesia. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru berdiri, cukup besar harapan kelompok Islam di Indonesia untuk kembali membangun peradaban umat muslim di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan kelompok Islam di Indonesia (khususnya yang bersebrangan dengan pemerintahan Presiden Soekarno), ialah mengajukan rehabilitasi dan pembangunan kembali partai politik Masyumi. Usulan untuk membangun kembali partai politik Masyumi kepada pemerintahan Orde Baru, pada perkembangannya ditolak dan usulan yang diajukan oleh mantan Wakil Presiden Moh. Hatta untuk membangun Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) juga ditolak oleh penguasa Orde Baru.

Desakan kelompok Islam Indonesia untuk dapat diakomodir dalam kehidupan politik nasional pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pada perkembangannya diberikan jalan tengah berupa pendirian PARMUSI ditahun 1968. Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) didukung oleh pemerintahan Orde Baru sebagai wadah untuk menyatukan kaum atau kelompok Islam di Indonesia, jalan ini ditempuh agar pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap kekuatan-kekuatan sosial Islam di Indonesia. Seperti diketahui pemerintahan Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang bergaya militeristik, kontrol terhadap wacana dan opini sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah untuk membendung konflik politik dan idiologi seperti pada masa pemerintahan Orde Lama.

Pada saat kongres berlangsung untuk mebetuk PARMUSI (Partai Muslimin Indonesia), pemerintahan Orde Baru mendukung kegiatan tersebut. Hasil kongres yang berlangsung pada tahun 1968 tersebut memutuskan dan memilih Mr. Mohamad Roem , sebagai ketua terpilih untuk memimpin PARMUSI. Keputusan kongres mengenai ketua terpilih tersebut (Mr. Mohamad Roem), tidak mendapat restu dari pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menilai bahwa Mr. Mohamad Roem bukanlah orang yang tepat untuk memimpin PARMUSI, karena Mr. Mohamad Roem merupakan salah satu pendiri dan petinggi dari bekas Partai Masyumi. Pemerintah OrdeBaru tidak menginginkan munculnya persepsi di masyarakat, bahwa PARMUSI adalah kelanjutan dari partai Masyumi di masa Orde Lama.

Sebagai pengganti ketua PARMUSI terpilih Mr. Mohamad Roem, pemerintahan Orde Baru menunjuk Mintaredja sebagai ketua PARMUSI yang direstui oleh pemerintah Orde Baru. Mintaredja dinilai sebagai sosok yang cukup moderat, dan mampu untuk mengakomodir tujuan politik pemerintahan Orde Baru. Pada perkembangan selanjutnya pemerintahan melanjutkan proses penyederhanaan partai politik di Indonesia dengan meleburkan kekuatan-kekuatan sosial-politik masyarakat Islam di Indonesia dalam sebuah partai yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Idiologi pembangunan (*developmentalism*) yang menjadi tujuan pemerintahan Orde Baru benar-benar dilekatkan dalam tekstual partai umat Islam tersebut, sebagai bukti untuk menyokong idiologi pembangunan.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dibentuk untuk kekuatan sosial-politik masyarakat Islam di Indonesia, diajukan ke parlemen dan disetujui pada 14 Agustus 1975. Proses penyederhanaan partai politik di Indonesia yang diajukan oleh pemerintahan Orde Baru juga berlaku bagi kekuatan sosial-politik di luar masyarakat Islam di Indonesia. Sebagai contoh lain adalah pembentukan Partai Demokrasi Indonesia yang dibentuk dari hasil peleburan PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai Katholik. Sementara itu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) hasil peleburan dari Partai NU, PARMUSI, PSH dan Perti. Peleburan partai-partai politik di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru, dinilai sebagai langkah untuk mewujudkan iklim depolitisasi dalam kehidupan politik nasional.

Situasi semakin menyudutkan bagi kekuatan sosial-politik umat Islam di

Indonesia, manakala pemerintahan Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal yang harus diterima oleh semua kelompok masyarakat di Indonesia. Ide-ide serta cita-cita untuk mewujudkan syariat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia menjadi semakin sulit untuk diwujudkan. Jika tidak mendukung pemerintahan dalam menerapkan Pancasila, sebagai asas tunggal maka dia atau kelompok tersebut dinilai sebagai perongrong wibawa pemerintah. Kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal merupakan pukulan terakhir bagi sebagian kelompok Islam di Indonesia, dalam upaya untuk mewujudkan negara yang berdasarkan syariat. Harapan yang sempat menyala kembali setelah runtuhnya pemerintahan Orde Lama dan berakhirnya kaum komunisme di Indonesia, pada akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa cita-cita tersebut semakin sulit diraih dibawah pemerintahan Orde Baru yang cenderung militeristik.

## **B. Gambaran Umum Dunia Pendidikan Dan Konsolidasi Sosial-Politik Pemerintahan Orde Baru**

Pemerintahan Orde Baru yang menekankan kehidupan ekonomi sebagai panglima (pemerintahan Orde Lama menjadikan politik sebagai panglima), kemudian merumuskan garis-garis besar kebijakan penataan ekonomi Indonesia melalui kebijakan Repelita. Memasuki pelaksanaan Repelita I ditahun 1969, pemerintah Orde Baru berupaya untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pendidikan nasional. Berdasarkan rumusan para pakar pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru, diputuskan bahwa arah pendidikan nasional Indonesia harus dapat mencapai

: keberhasilan pelaksanaan pendidikan ketika peserta didik dapat menjadi tenaga kerja; masyarakat harus dibangun menuju masyarakat yang rasional; pelaksanaan pendidikan dan pengajaran harus memberikan kesempatan yang luas bagi pendidikan teknik dan kejuruan; harus terdapat perbaikan dalam metode mengajar (khususnya penggunaan buku-buku) dan terdapat upaya untuk meningkatkan mutu guru-guru di Indonesia (Tilaar, 1995: 116; Umasih, 2008: 90).

Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru, menjadikan semacam sinyal bahwa para guru-guru akan sangat diberikan perhatian lebih oleh pemerintah. Hal ini bukanlah satu hal yang berada diluar ramalan, mengingat pemerintah Orde Baru melalui kebijakan pembangunan (Repelita) lebih mengutamakan stabilitas kehidupan sosial dan politik dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Orde Baru seperti belajar dari kesalahan pendahulunya (pemerintah Orde Lama), bahwa upaya untuk melakukan pembanguana serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, harus pula disertai dengan jaminan dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik (Taufik dan Huddy, 2018: 32).

Pembangunan nasional sebagai doktrin utama pemerintahan Orde Baru merupakan pedoman yang harus diselaraskan dengan dunia pendidikan nasional. Dunia pendidikan nasional, arah serta kebijakannya harus sedapat mungkin menopang dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional yang dirumuskan dalam kebijakan Repelita. Dunia pendidikan nasional merupakan

penyangga utama dalam menjalankan kebijakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), yang menjadi kerangka utama kerja pemerintahan Orde Baru setiap lima tahun. Dalam Repelita I hingga Repelita III, dunia pendidikan nasional dilaksanakan secara berjenjang. Pada Repelita I diupayakan untuk mendapatkan input-input pokok dalam merumuskan arah serta orientasi pendidikan nasional. Dalam merumuskan pendidikan nasional dalam periode Repelita I, kelompok Cipayang memiliki peran yang cukup penting dalam merumuskan arah dan orientasi pendidikan nasional (Umasih, 2008: 90).

Dalam kebijakan Repelita II dan Repelita III pelaksanaan pendidikan nasional terbagi dalam dua tahap kerja pokok, pada Repelita II dunia pendidikan nasional sedapat mungkin dihubungkan dengan dunia tenaga kerja. Pendidikan nasional harus menjadi tulang punggung utama dalam upaya menyuplai sumber daya manusia yang siap digunakan dalam pasar tenaga kerja. Pendidikan dengan berbasis teknologi dan kejuruan menjadi model pendidikan yang utama untuk diselenggarakan. Sementara itu dalam pelaksanaan Repelita III dunia pendidikan nasional harus mampu memberikan kesempatan kepada orang banyak, untuk dapat mengenyam pendidikan, serta menjangkau sejauh mungkin orang-orang yang berada di Indonesia. Dalam pelaksanaan kerja dunia pendidikan nasional di Repelita III, kerja pemerintah sangat bergantung kepada besaran dana APBN, agar dapat melaksanakan amanat pendidikan nasional.

Fenomena yang cukup menarik dalam pelaksanaan pendidikan nasional pada periode Repelita III adalah

pelaksanaan kebijakan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), serta pemberian materi ajar PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) dan PMP (Pendidikan Moral Pancasila). Agenda utama pemerintahan Orde Baru terletak dalam kebijakan Repelita III, dimana dunia pendidikan nasional harus mampu menciptakan manusia-manusia Indonesia yang mampu mengikuti arah politik kebijakan pemerintah yang berkuasa, bukan menjadikan manusia yang bebas, kritis dan inovatif. Pendidikan nasional dalam penafsiran lain sesuai dengan yang tertera dalam kebijakan Repelita III, adalah mengusahakan agar orang-orang yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan dari penguasa.

Kebijakan pendidikan nasional yang diselenggarakan dengan arah kebijakan politik pembangunan nasional, merupakan tekanan utama yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru dalam sektor pendidikan. Dua hal tersebut kemudian merumuskan tentang bagaimana teknis pelaksanaan pendidikan, baik jenjang hingga pemekaran wilayah secara bertahap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Hal yang terpenting pula adalah content/ isi yang hendak diberikan kepada subjek belajar dan pelaksanaan pendidikan pengajaran, karena sumber daya manusia yang diinginkan adalah orang-orang yang mengerti apa yang diinginkan oleh penguasa dan menciptakan orang-orang yang mampu memenuhi arah dan kebutuhan penguasa.

Sekiranya apa yang dijelaskan dalam sub-bab ini hanya mengupas secara umum tentang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan pada masa awal pemerintahan Orde Baru. Kelompok belajar pendidikan yang berbasis agama,

seperti Pesantren akan dijelaskan dalam sub-bab selanjutnya.

Pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan pendidikan dirumuskan untuk dapat menopang kebijakan pembangunan nasional, maka dari itu sedapat mungkin dunia pendidikan nasional harus mampu selaras dengan jargon dan tujuan tersebut. Modernisasi pendidikan dengan memasukan unsur pembelajaran terhadap teknologi merupakan tuntutan yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sekolah-sekolah yang berada dalam naungan pemerintah, khususnya yang berada dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, terhitung sejak berlangsung kebijakan Repelita III telah mengintegrasikan pendidikan dan pengajaran dengan berbasis teknologi.

Pengintegrasian teknologi dalam proses belajar mengajar yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah yang bernaung dibawah pemerintah, merupakan sebuah fenomena mobilisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang kebutuhan pasar tenaga kerja. Semua itu dapat dilakukan juga dengan dukungan manajerial birokrasi yang menjadi alat utama bagi pemerintahan Orde Baru. Birokrasi merupakan perangkat utama bagi pemerintahan Orde Baru untuk dapat memuluskan rencana dan pembangunan nasional. Keberadaan birokrasi pula yang menjadi jalan bagi pemerintahan Orde Baru untuk dapat melanggengkan kekuasaannya. Muhammad Syamsudin (2010: 149) menjelaskan bahwa dengan bantuan Golkar dan Birokrasi, pemerintahan Orde Baru mendapat dukungan yang kuat dari daerah hingga pemerintahan pusat.



Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, dapat dikatakan sebagai sebuah upaya berkelanjutan yang dijalankan sejak pemerintahan Orde Lama. Perbedaan yang utama dalam dua periode pemerintahan tersebut (Orde Lama dan Orde Baru), hanya terletak pada orientasi hasil dari pendidikan nasional. Disatu pihak (Orde Lama) berharap penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan kelanjutan untuk mempertahankan ide-ide kemerdekaan dan revolusi nasional Presiden Soekarno (Taufik dan Huddy, 2018: 61). Sementara itu disisi lain (Orde Baru) penyelenggaraan pendidikan nasional terintegrasi dengan sistem kapitalisme internasional (pasar tenaga kerja).

Warisan yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, dalam bidang pendidikan adalah keberadaan lembaga pendidikan formal (sekolah-sekolah umum dibawah naungan pemerintah) dan sekolah yang berada diluar naungan pemerintah (seperti Pesantren). Keberadaan sekolah yang dikelola oleh swasta seperti Pesantren adalah lembaga pendidikan yang sejatinya telah ada sejak masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Keberadaan Pesantren semakin bertambah seiring dengan menguatnya proses islamisasi di Hindia-Belanda. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah telah memberikan pengesahan (legalitas) terhadap keberadaan Pesantren dalam dinamika pendidikan nasional, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1946. Meskipun dalam suasana keterbatasan menghadapi agresi militer Belanda, pemerintah memberikan bantuan dalam operasional

belajar, akan tetapi substansi pengajaran masih diberikan kepada kewenangan pengarah pondok pesantren.

Setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda dan Internasional, pemerintahan Presiden Soekarno melalui Menteri Agama memberikan legalitas berikutnya terhadap lembaga Pesantren. Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952, pesantren mulai mendapatkan perhatian, dalam bentuk penyeragaman jenjang pendidikan. Dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa jenjang pendidikan madrasah adalah:

1. Madrasah Rendah (sekarang dikenal dengan sebutan Madrasah Ibtidaiyah) dengan masa belajar 6 tahun
2. Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (sekarang Madrasah Tsanawiyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Ibtidaiyah.
3. Madrasah Lanjutan Atas (sekarang Madrasah Aliyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Tsanawiyah (Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952).

Dinamika politik nasional yang cukup besar pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tidak banyak memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan pesantren untuk berbuat banyak dalam mendukung pendidikan nasional. Para pemimpin pesantren (kyai) hingga santri cukup banyak yang terkooptasi dengan dinamika politik, yang cenderung bersifat pragmatis. Pada kondisi keterwakilan para pendidik di lembaga-lembaga pendidikan pesantren ke dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi alternatif keberpihakan mereka secara nasionalis. (Kosasih, 2016). Konflik antara Partai

Komunis Indonesia di dalam parlemen, hingga pemberatasan kekuatan-kekuatan sosial-politik Partai Komunis Indonesia juga melibatkan unsur-unsur yang berasal dari lembaga pesantren baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno, yang digantikan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi lembaga pendidikan pesantren. Pada tahun 1967, diterbitkan kebijakan Penetapan Menteri Agama No. 80 tahun 1967 yang mengatur pendirian lembaga pesantren (dengan jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah) yang dikelola dan dibawah naungan pemerintah. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, lembaga pendidikan pesantren mulai berstatus milik pemerintah. Melalui sumber yang didapatkan, tercatat sejak tahun 1967 hingga tahun 1970 lembaga pesantren yang dimiliki oleh pemerintah sudah mencapai angka 358 buah. Pada tahun berdasarkan pelaksanaan kebijakan Keputusan Menteri Agama no. 15,16 dan 17 tahun 1978, singkatan Madrasah Tsanawiyah Negeri dari M.Ts.A.I.N diubah menjadi MTsN dan jumlahnya menjadi 470 buah.

Lembaga pesantren merupakan lembaga pendidikan di Indonesia yang telah berkembang jauh sebelum masa kolonial, khususnya di wilayah Jawa Barat (Cirebon-Kuningan). Sejarah mencatat bahwa pesantren di wilayah Cirebon-Kuningan mulai diperkenalkan oleh Sunan Gunung Jati sebagai tempat untuk mempelajari agama islam, dan bertaqarub terhadap Allah SWT (Hamzah, 2014: 5). Wilayah Kuningan sebagai wilayah pedalaman di bagian selatan Cirebon, merupakan wilayah

pertemuan antara orang-orang di pesisir Cirebon dengan wilayah pedalaman priangan. Cirebon yang sejak masa pemerintahan Sunan Gunung Jati menjadi salah satu sentra pelayaran dan perdagangan di pesisir utara pulau Jawa, menjadi pintu masuk bagi perkembangan agama Islam di wilayah Priangan Timur.

Pada perkembangannya pesantren menjadi wadah bagi tumbuhnya para elite-elite lokal di pedesaan. Kyai merupakan elite-elite lokal di pedesaan yang umumnya muncul dari pranata pesantren. Berbekal kecakapan dan keahlian mengenai pengetahuan agama (Islam), serta ditopang oleh aspek kharismatik yang umumnya melekat dalam simbol pemimpin tradisional, membuat Kyai menjadi figur sentral dalam lembaga pesantren. Kyai sebagai figur dalam lembaga pesantren merupakan pelembagaan yang telah berdinamika dalam waktu yang cukup panjang, dan mampu bertahan hingga masa Indonesia merdeka, bahkan hingga saat ini. Figur sentral yang dimiliki dan melekat kepada seorang Kyai, yang tidak lain juga sebagai pemimpin pesantren sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Orde Baru.

Pemerintahan Orde Baru yang lebih cenderung mengarah kepada tipe pemerintahan yang sentralistis, serta menuntut ketaatan dalam melaksanakan tujuan-tujuan bernegaranya, membutuhkan dukungan dari para elite-elite dari tingkat pusat hingga tingkat lokal/desa. Kyai sebagai figur utama dalam wilayah desa, melalui keberadaan pesantrennya juga dibutuhkan untuk menopang kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Desa sebagai basis sumber daya manusia dan sumber ekonomi melalui sektor pertanian dan perkebunan,

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam format ekonomi pemerintahan Orde Baru. Kontrol terhadap wilayah desa (SDM dan SDA), akan lebih mudah bagi pemerintahan Orde Baru, jika mampu mengintegrasikan figur Kyai kedalam kehidupan politik pemerintah Orde Baru.

Melalui peran yang dimainkan oleh birokrasi lokal tingkat daerah, pemerintahan Orde Baru mencoba untuk mengintegrasikan Kyai (pemimpin pesantren), dengan politik pemerintahan Orde Baru. Sebagai bentuk upaya pengintegrasian antara Kyai dengan sistem politik dan pemerintahan Orde Baru adalah dengan memberikan kesempatan bagi para Kyai untuk masuk kedalam Golongan Karya. Selain memberikan kesempatan untuk masuk kedalam Golongan Karya, pemerintah Orde Baru, melalui penunjukan Presiden memberikan kesempatan kepada Kyai untuk menjadi pemimpin lokal di wilayahnya (seperti menjadi Bupati, Walikota, hingga Gubernur). Pada masa pemerintahan Orde Baru di wilayah Kuningan, cukup banyak para Kyai yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan Golongan Karya, para Kyai hadir dalam pertemuan-pertemuan (politik) dengan menggunakan jaket Golongan Karya

### **C. Jaringan Pesantren dan Perkembangan Pesantren Hingga Akhir Pemerintahan Orde Baru**

Proses mengintegrasikan pesantren-pesantren kedalam orbit kekuasaan politik pemerintahan Orde Baru, bukanlah satu hal yang cukup mudah karena jumlah pesantren yang tidak sedikit dan juga terkadang berbeda pandangan visi dengan pemerintahan Orde Baru. Untuk mendapatkan sokongan dari pelebagaan pesantren di tingkat desa-desa, khususnya

di wilayah Kuningan, Jawa Barat, pemerintahan Orde Baru menggunakan birokrasi dan mengandalkan pembentukan jaringan pesantren yang telah ada sebelumnya. Seperti diketahui bahwa birokrasi adalah alat utama yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru untuk dapat merangkul dan menjangkau masyarakat di Indonesia. Birokrasi pula yang kemudian menjadi penopang bagi pemerintahan Orde Baru untuk dapat mengamankan kekuasaan yang ada. Disetiap agenda pemilihan umum (Pemilu), birokrasi memainkan peran yang cukup penting, agar Golongan Karya (sebagai penyokong utama pemerintahan Orde Baru) dapat memenangkan kontestasi pemilu di Indonesia.

Jaringan birokrasi yang menjadi dasar bagi kepentingan politik pemerintahan Orde Baru, sejatinya diterapkan pula untuk dapat menghegemoni pelebagaan pesantren di Indonesia. Mesin birokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru, juga menjadi alat untuk dapat masuk kedalam lembaga pesantren dan mendapatkan dukungan dari pelebagaan pesantren. Karir politik yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru bagi setiap elite lokal atau desa yang bersedia mendukung pemerintahan Orde Baru melalui Golongan Karya, menjadi semacam tantangan (godaan) bagi setiap elite lokal khususnya pemimpin pondok pesantren. Tidak hanya peluang karir dalam bidang politik, pemerintahan Orde Baru juga memberikan banyak bantuan (pendanaan) dan kemudahan (administrasi), bagi para elite lokal religi (Kyai) yang mengasuh pondok pesantren dengan kompensasi mendukung pemerintahan Orde Baru.

Pemilihan dan penentuan kepada

lembaga pesantren mana yang akan mendapatkan bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintahan Orde Baru, sangat ditentukan oleh jaringan sosial yang dimiliki oleh lembaga pesantren tersebut. Jaringan pelebagaan sosial yang menghubungkan pesantren sangat ditentukan oleh jaringan tarekat yang ada di wilayah Cirebon-Kuningan. Pada masa pemerintahan Orde Baru, jaringan tarekat yang ditopang oleh pemerintahan Orde Baru diantaranya adalah Tarekat Asy-Syahadatain (Rahma, 2016: 76).

Jaringan tarekat adalah salah satu mata rantai yang mendukung jaringan pelebagaan Pesantren yang berada di wilayah Cirebon-Kuningan, berbekal jaringan yang telah ada sejak masa kolonial Belanda tersebut, kerja-kerja sosial dan politik pemerintah Orde Baru, dalam rangka menghegemoni pelebagaan pesantren dapat dilakukan. Kepada para Kyai dan pesantren-pesantren yang mendukung pemerintahan, penguasa Orde Baru memberikan apresiasi terhadap loyalitas mereka dengan cara keterlibatan para pimpinan pemerintahan pusat dalam menghadiri acara-acara yang diadakan oleh para lembaga pesantren (Rahma, 2016: 76).

Masuknya Kyai dan lembaga pesantren dalam orbit kekuasaan dan politik pemerintahan Orde Baru, memberikan sokongan kepada pemerintahan Orde Baru untuk menjalankan kekuasaannya dari tingkat daerah hingga pusat. Dukungan dari daerah sebagai sumber utama SDM dan SDA dibutuhkan oleh pemerintah Orde Baru untuk menjalankan strategi sosial-politiknya. Pembaharuan yang dilakukan di wilayah kota dengan mengintegrasikan

nilai-nilai modernitas dan teknologi, juga merambah menuju wilayah pedesaan. Lembaga pesantren sebagai wahana pendidikan di tingkat desa yang cukup mayoritas, merupakan pelebagaan sosial yang akan difungsikan untuk memodernisasi kehidupan di desa.

Pesantren-pesantren yang telah masuk dalam orbit politik Orde Baru, diharuskan untuk mengubah model belajar (*salafi* menuju modern) dengan menggunakan muatan belajar yang telah ditentukan oleh pemerintah Orde Baru. Ilmu agama yang semula menjadi muatan pembelajaran yang mayoritas diberikan pada para santri di pesantren, pada perkembangannya harus memberikan tempat bagi muatan-muatan ilmu pengetahuan sekuler (umum), seperti : geografi, ekonomi, matematika dan lain sebagainya. Pemberian muatan ilmu pengetahuan umum (sekuler) yang dilaksanakan dalam proses belajar dan mengajar di pesantren, sesuai dengan keputusan Pemerintahan Orde Baru harus memiliki komposisi 70% pelajaran sekular dan 30% pelajaran agama (Syaifullah, Tanpa Tahun: 8).

Proses perubahan muatan kurikulum yang berlangsung dalam pelebagaan pesantren, menunjukkan bahwa pesantren seolah-olah dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan modernisasi di masyarakat. Masifnya niat pemerintahan Orde Baru untuk dapat memodernkan masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tuntutan pasar tenaga kerja, telah membuat hampir sebagian besar pesantren-pesantren di Indonesia (khususnya di wilayah Kuningan) mengubah orientasi pembelajarannya. Tuntutan untuk memenuhi pasar tenaga kerja dalam dunia industri nasional yang

sedang bergerak di Indonesia pada periode pemerintahan Orde Baru, membuat semua lembaga pendidikan di Indonesia (termasuk pesantren) harus terintegrasi dengan sistem pendidikan formal yang dibentuk oleh pemerintah. Dengan terintegrasinya pesantren kedalam sistem pendidikan formal yang dibentuk oleh pemerintahan Orde Baru, maka lulusan dari pesantren mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi. Keputusan tersebut (diakuinya lulusan pesantren untuk dapat masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi), tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989.

Fenomena perubahan orientasi pendidikan dan pengajaran dalam tubuh pelebagaan pesantren di wilayah Kuningan-Jawa Barat, umumnya berlangsung pada periode tahun awal 1980 sampai dengan 1990-an. Salah satu contoh pesantren di wilayah Kuningan Jawa-Barat yang bertransformasi menjadi pelebagaan pendidikan modern adalah pondok pesantren Khusnul Khotimah yang berdiri pada tahun 1994 (Departemen Agama RI, 2001:123-131). Perubahan cara pandang terhadap lembaga pendidikan di Indonesia (sebagai wahana menciptakan SDM yang mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja dunia), memberikan tantangan yang cukup besar bagi pelebagaan pesantren. Disatu sisi pesantren harus mampu untuk mempertahankan identitasnya sebagai lembaga pendidikan di Indonesia yang asli, akan tetapi disisi lain tuntutan modernisasi dari gerakan globalisasi dunia tidak dapat dihindarkan oleh pesantren (Madjid, 1977: 103).

Situasi perubahan yang terjadi terhadap proses belajar mengajar di

pelebagaan pesantren, yang berorientasi terhadap tuntutan pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja telah memberikan keresahan bagi masyarakat di kalangan pesantren. Khususnya bagi para pemilik dan pengelola lembaga pendidikan pesantren, yang memandang situasi tersebut dapat menjadi ancaman bagi identitas dan jatidiri pesantren sebagai locus pendidikan ahlak, moral dan keagamaan di masyarakat. Keresahan-keresahan tersebut coba diakomodasikan oleh pemerintahan Orde Baru untuk dapat menenangkan gejolak masyarakat Islam di Indonesia. Melalui kebijakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kepres No. 34 Tahun 1972, menjadi jalan untuk menghindari meletusnya keresahan umat Islam dalam proses pendidikan di pesantren.

Keresahan-keresahan umat Islam yang terjadi pada masa Orde Baru, sejatinya tidak dapat dihindari atau dianalisis secara sempurna oleh pemerintahan Orde Baru. Upaya penghilangan *sense* politik umat islam di Indonesia oleh pemerintahan Orde Baru, tidak sepenuhnya hilang karena masih terdapat para aktivis dan cendekiawan muslim yang tetap berjuang untuk menghidupkan khasanah politik Islam di Indonesia. Para tokoh cendekiawan muslim seperti : Abdurrahman Wahid, Amin Rais dan lainnya tetap melakukan kritik terhadap nasib masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya umat muslim di Indonesia (Syamsuddin dan Fatkhan, 2010: 154). Pada penghujung berakhirnya pemerintahan Orde Baru, hilangnya kepercayaan umat islam yang terlembagakan dalam tokoh-tokoh ulama dan pesantren menjadi faktor yang mempercepat keruntuhan

kepemimpinan Presiden Soeharto di penghujung tahun 1997.

## **KESIMPULAN**

Mesin birokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru, juga menjadi alat untuk dapat masuk ke dalam lembaga pesantren dan mendapatkan dukungan dari pelembagaan pesantren. Karir politik yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru bagi setiap elite lokal atau desa yang bersedia mendukung pemerintahan Orde Baru melalui Golongan Karya, menjadi semacam tantangan (godaan) bagi setiap elite lokal khususnya pemimpin pondok pesantren. Tidak hanya peluang karir dalam bidang politik, pemerintahan Orde Baru juga memberikan banyak bantuan (pendanaan) dan kemudahan (administrasi), bagi para elite lokal religi (Kyai) yang mengasuh pondok pesantren dengan kompensasi mendukung pemerintahan Orde Baru.

Pemilihan dan penentuan kepada lembaga pesantren mana yang akan mendapatkan bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintahan Orde Baru, sangat ditentukan oleh jaringan sosial yang dimiliki oleh lembaga pesantren tersebut. Jaringan pelembagaan sosial yang menghubungkan pesantren sangat ditentukan oleh jaringan tarekat yang ada di wilayah Cirebon-Kuningan. Pada masa pemerintahan Orde Baru, jaringan tarekat yang ditopang oleh pemerintahan Orde Baru diantaranya adalah Tarekat Asy-Syahadatain. Jaringan tarekat adalah salah satu mata rantai yang mendukung jaringan pelembagaan Pesantren yang berada di wilayah Cirebon-Kuningan, berbekal jaringan yang telah ada sejak masa kolonial Belanda tersebut, kerja-kerja sosial dan politik pemerintah Orde Baru, dalam

rangka menghegemoni pelembagaan pesantren dapat dilakukan. Kepada para Kyai dan pesantren-pesantren yang mendukung pemerintahan, penguasa Orde Baru memberikan apresiasi terhadap loyalitas mereka dengan cara keterlibatan para pimpinan pemerintahan pusat dalam menghadiri acara-acara yang diadakan oleh para lembaga pesantren.

Bahwa fenomena perubahan orientasi pendidikan dan pengajaran dalam tubuh pelembagaan pesantren di wilayah Kuningan-Jawa Barat, umumnya berlangsung pada periode tahun awal 1980 sampai dengan 1990-an. Situasi perubahan yang terjadi terhadap proses belajar mengajar di pelembagaan pesantren, yang berorientasi terhadap tuntutan pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja telah memberikan keresahan bagi masyarakat di kalangan pesantren. Khususnya, bagi para pemilik dan pengelola lembaga pendidikan pesantren, yang memandang situasi tersebut dapat menjadi ancaman bagi identitas dan jatidiri pesantren sebagai locus pendidikan ahlak, moral dan keagamaan di masyarakat. Keresahan-keresahan tersebut coba diakomodasikan oleh pemerintahan Orde Baru untuk dapat menenangkan gejolak masyarakat Islam di Indonesia. Melalui kebijakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kepres No. 34 Tahun 1972, menjadi jalan untuk menghindari meletusnya keresahan umat Islam dalam proses pendidikan di pesantren

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Arsip Nasional**

ANRI, Penetapan Menteri Agama No. 80 tahun 1967

Undang-Undang Sistem Pendidikan

- Nasional No. 2 Tahun 1989  
ANRI, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)  
Kepres No. 34 Tahun 1972
- Buku/Jurnal**
- Burhanudin, Jajat. 2012. *Ulama dan kekuasaan: pergumulan elite politik muslim dalam sejarah Indonesia*. Jakarta: MIZAN
- Herman, DM. 2013. "Sejarah pesantren di Indonesia" *Jurnal Al-Ta'dib Vol.6 No.2, Juli – Desember 2013*
- Madjid, Nurchalis. 1997. *Bilik-bilik pesantren sebuah potret perjalanan*, Jakarta: Paramadina.
- Muhakamurrohman, Ahmad. 2014, "Pesantren: santri, kiai dan tradisi" *Jurnal Kebudayaan Islam Vol. 12, No.2, Juli-Desember 2014 hal. 109-118*
- Kosasih, Ahmad. 2016. "Perjuangan guru di masa revolusi: sejarah PGRI di awal pendiriannya". *SOSIO-E-KONS*, Vol. 8 No. 2 Agustus 2016, hal. 91-103
- Rahma, Lutfiah. 2016. "Kebertahanan Tarekat Asy-Syahadatain di Cirebon Jawa Barat 1947-2001". *Skripsi Universitas Negeri Jakarta*.
- Syaifullah, Khalid. Tanpa Tahun. *Hegemoni Orde Baru terhadap pesantren: telaah konsep hegemoni Gramscian*.
- Syamsuddin, Muh dan Fatkan, Muh. *Jurnal DAKWAH*, Vol. XI No. 2, Juli-Desember 2010
- Taufik dan Huddy Husin. 2018. "Dari Martabat Profesi Hingga Sertifikasi Sejarah Guru di Jakarta 1965-2014". *Laporan Penelitian Jakarta: Laporan Penelitian LPPM Universitas Indraprasta PGRI*.
- Tilaar, H.A.R. 1995. *50 tahun pembangunan pendidikan nasional 1945-1995: suatu analisis kebijakan*. Jakarta : Grasindo.
- Umasih, 2008. "Pelaksanaan kebijakan jabatan guru IPS SMP-SMA pada sembilan provinsi di Indonesia era Orde Baru 1966-1998". *Disertasi*. Program Doktor Universitas Indonesia.